



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

**UNIT KERJA** : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : DJOKO PUDJIRAHARDJO
2. Jabatan : KEPALA PUSAT PERENCANAAN HUKUM NASIONAL
3. NHK : 156916

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.095.000.000

1. Tanah Seluas 216 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI  
Rp. 50.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 247 m2/80 m2 di KAB / KOTA  
SLEMAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 460.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 145 m2/60 m2 di KAB / KOTA  
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
4. Tanah Seluas 430 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI  
Rp. 225.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 68.000.000

1. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI  
Rp. 3.000.000
2. MOBIL, HONDA HONDA JAZZ Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.  
65.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 60.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 495.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.718.000.000

**III. HUTANG** Rp. 50.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.668.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.